

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Menurut Amani (2018), salah satu usahanya yaitu dengan melakukan pembinaan, menumbuhkan dan mengembangkan baik usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah (UMKM). Begitu pula menurut Astriani, Herawati dan Dewi (2018) bahwa modal utama pembangunan perekonomian Indonesia yaitu bergantung pada keberadaan UMKM yang handal dan kuat. Peranan UMKM di Indonesia sangatlah besar, karena dalam UMKM ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan usaha ini dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pernyataan tersebut didukung melalui data dari Kemenkop dan UMKM pada tahun 2020 bahwa saat ini 99,9% usaha di Indonesia merupakan sektor UMKM yang didominasi pada skala usaha mikro.

UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Bab I pasal 1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pencapaian akan berkembangnya UMKM yang luar biasa luar menurut Barus, Indrawaty dan Solihin (2018) tentunya tidak luput dari berbagai masalah dan tantangan. Masalah internal yang sering timbul pada entitas mikro, kecil dan menengah biasanya berasal dari aspek pendanaan, oleh karena itu peranan akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu memperlancar aktivitas entitas. Dari peranan akuntansi tersebut dapat dihasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk melihat informasi keuangan atau aktivitas dari entitas serta dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja. Laporan keuangan merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap pelaku usaha sebagai bahan pengambilan keputusan. Agar bersifat akurat, berkualitas dan dapat dipercaya, laporan keuangan entitas wajib disusun berdasarkan standar keuangan yang berlaku.

Di Indonesia, standar akuntansi keuangan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan dibentuknya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Di dalam PSAK No.1 (IAI, 2018) menyebutkan bahwa terdapat enam jenis laporan keuangan dengan kegunaan masing-masing yang wajib dilakukan perusahaan. Diantaranya enam jenis laporan keuangan meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Posisi Keuangan pada Awal Periode Komprehensif. Kegunaan dari Laporan Posisi Keuangan yaitu perusahaan dapat mengetahui informasi mengenai aset, liabilitas dan ekuitas pada akhir periode. Untuk laporan kinerja atau laba/rugi yang menyajikan akumulasi pendapatan dikurangi dengan beban operasional

dan beban pajak yang merupakan hasil kinerja perusahaan selama satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan kekayaan perusahaan dalam satu periode. Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi arus kas keluar dan masuk berupa aktivitas operasional, aktivitas investasi serta aktivitas pendanaan. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan tentang penjelasan detail yang angkanya tidak dapat diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan Posisi Keuangan pada Awal Periode Komperatif disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

Keberadaan laporan keuangan UMKM menurut Nuvitasari, Martiana dan Citra Y (2019) digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang berguna bagi pengguna laporan keuangan baik untuk manajemen internal maupun digunakan sebagai prasyarat pengajuan kredit. Akan tetapi, permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan penelitian dari Uno, Kalani dan Pusung (2019) yaitu entitas masih menganggap tabu untuk melakukan penyusunan yang mengikuti standar karena merasa belum perlu menambah pembiayaan dari bank konvensional. Pelaku UMKM umumnya tidak menggunakan standar yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan kegiatan usahanya, UMKM seringkali menggunakan basis kas yang diambil dari sumber catatan mutasi kas (Saputra dan Putrayasa, 2020). Begitu pula pada penelitian Yuwono, Yulinartati dan Afroh (2020) mengungkapkan bahwa masih banyak UMKM yang belum menggunakan standar laporan keuangan yang memadai. UMKM menyusun laporan keuangan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran guna mendapatkan informasi laba saja. Permasalahan lain menurut Septiani dan Wuryani (2020) mengungkapkan bahwa persyaratan utama untuk mewujudkan perkembangan UMKM yaitu dengan kinerja yang baik pada seluruh sektor yang ada seperti keuangan, produksi, distribusi dan pemasaran.

Untuk memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan bagi pelaku UMKM, maka pada tanggal 24 Oktober 2016 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) melalui DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) meresmikan SAK EMKM yang merupakan penyederhanaan dari SAK ETAP. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang resmi diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2018 silam ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menerbitkan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pihak investor dan kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan, disamping itu juga untuk membantu pemilik mengetahui kondisi keuangan usahanya serta sebagai pelengkap persyaratan ketika akan mengajukan kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya.

Melihat pentingnya penerepan SAK EMKM terhadap pencatatan akuntansi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang memiliki topik serupa dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Namun perbedaannya pada penelitian ini yang menjadi obyek adalah Toko Baju Anak Rahma Apparel, yang mana toko ini merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang perdagangan baju anak baik secara ritel maupun grosir. Meskipun sejak bulan Mei tahun 2020 usaha ini sudah menggunakan sistem pencatatan keuangan secara komputerisasi, namun pencatatan yang dilakukan pemilik UMKM masih sederhana dan hanya mencatat penjualan dan pengeluaran toko saja. Oleh karena itu, dengan disusunnya laporan keuangan yang mengikuti standar diharapkan Toko Baju Anak Rahma Apparel dapat mengetahui kinerja UMKM terkait peningkatan penjualan, peningkatan laba, peningkatan modal karena dengan mengetahui kinerja merupakan syarat mutlak bagi UMKM untuk terus hidup dan berkembang.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Toko Baju Anak Rahma Apparel?
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada Toko Baju Anak Rahma Apparel Malang?
3. Bagaimana pengukuran kinerja UMKM pada Toko Baju Anak Rahma Apparel?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Toko Baju Anak Rahma Apparel.
2. Untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada Toko Baju Rahma Apparel Malang.
3. Untuk mengukur kinerja UMKM pada Toko Baju Anak Rahma Apparel.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan pengetahuan untuk dunia pendidikan dan pentingnya diterapkan pada UMKM.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan laporan keuangan Toko Baju Anak Rahma Apparel yang sesuai dengan SAK EMKM.